KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mulai ramai dibahas, buruh tuntut kenaikan UMP 2026
Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Mulai Ramai Dibahas

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2026

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Tuntutan ini pun mendapat respons dari Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, angka tersebut bukan sekadar tuntutan politis, melainkan hasil perhitungan objektif yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024.

Menurut dia, putusan itu menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"Inflasi dari Oktober 2024 sampai September 2025 sebesar 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,2 persen. Kalau dijumlahkan, hasilnya 8,46 persen, kami bulatkan jadi 8,5 persen," ujar Said Iqbal, Sabtu (18/10/2025).

Iqbal menilai, dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional dan turunnya angka pengangguran, usulan ini tergolong realistis dan berpijak pada situasi faktual.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, tuntutan besaran kenaikan UMP 2026, sah-sah saja. Namun, kata dia, Pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam kondisi ekonomi yang belum stabil.

"Presiden sebaiknya memanggil ketua serikat buruh tingkat perusahaan yang mewakili tiap provinsi, perwakilan pengusaha, dan para kepala daerah untuk duduk bersama," ujar Irma kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (19/10/2025).

Untuk mengetahui pandangan Said Iqbal dan Irma Suryani Chaniago mengenai tuntutan besaran kenaikan UMP 2026, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO
Anggota Komisi IX DPR

Sebaiknya, Presiden Ajak Semua Pihak

> Ya dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi, melimpahnya pemutusan hubungan kerja. Jadi harus dilihat, apakah perusahaan mampu.



BAGAIMANA Anda melihat tuntutan KSPI yang meminta kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen?
Sah-sah saja jika ada tuntutan kenaikan upah. Namun yang harus diperhatikan adalah kemampuan perusahaan.

Bagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini?
Ya dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi, melimpahnya pemutusan hubungan kerja. Jadi harus dilihat, apakah perusahaan mampu.

Apa usulan Anda agar kebijakan upah bisa adil bagi semua pihak?
Usul saya, Presiden memanggil ketua serikat buruh tingkat perusahaan yang mewakili tiap provinsi, perwakilan pengusaha tiap provinsi, beserta gubernur-gubernurnya. Mereka duduk bersama agar saling ada pemahaman dan keterbukaan, sehingga dapat diambil keputusan yang komprehensif dan adil bagi semua pihak.

Apakah Dewan Pengupahan Nasional sudah mewakili semua daerah?
Dewan Pengupahan Nasional tidak mewakili seluruh provinsi. Presiden wajib mendengar aspirasi dari seluruh provinsi agar permasalahannya jelas.

Apa yang Anda khawatirkan jika kebijakan upah tidak memperhatikan kondisi perusahaan?
Saya khawatir akan makin banyak perusahaan yang pailit dan tutup.

Jadi serikat pekerja juga harus melihat kondisi perusahaan saat ini ya?
Tentu harus berpikir bijak juga, karena perusahaan pun harus didengar.

Apa langkah lain yang perlu dilakukan Pemerintah terkait tuntutan UMP ini?
Kebutuhan makin tinggi, maka Pemerintah harus mampu mengendalikan harga, terutama bahan-bahan primer atau pokok, agar daya beli masyarakat terjaga. ■ NNM

SAID IQBAL
Presiden KSPI

Bahas UMP Sebagai Ruang Dialog Sosial

> Kami mengingatkan agar Pemerintah tidak memutuskan sepihak tanpa dialog yang bermakna dengan perwakilan pekerja.



BOLEH dijelaskan mengenai tuntutan besaran angka kenaikan UMP 2026?
Kisaran itu mencerminkan variasi pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. Ada wilayah dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, seperti Maluku Utara yang pertumbuhannya mencapai lebih dari 20 persen. Karena itu kami menggunakan indeks tertentu sebesar 1,4. Hasilnya, di daerah seperti itu, kenaikan upah logisnya bisa mencapai 10,5 persen. Jadi kami ingin memberi ruang keadilan bagi daerah yang ekonominya memang tumbuh lebih cepat.

Sebagian kalangan menilai tuntutan ini terlalu tinggi dan bisa membebani dunia usaha. Bagaimana Anda menanggapinya?
Kami realistis. Buruh juga memperhitungkan kondisi ekonomi nasional. Justru kenaikan upah yang proporsional akan menggerakkan konsumsi rumah tangga dan memperkuat perekonomian nasional.

Kalau daya beli naik, sektor produksi ikut bergerak, dan itu baik untuk semua pihak. Jadi usulan ini bukan beban, tapi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai, kondisi ekonomi saat ini juga harus diperhatikan dalam menentukan besaran UMP?
Tahun lalu, Presiden Prabowo menggunakan indeks 0,9. Sekarang kami mengusulkan 1,0 karena kondisi ekonomi membaik dan angka pengangguran turun. Artinya, ada ruang fiskal dan produktivitas yang meningkat. Indeks ini bukan dibuat asal-asalan, melainkan menyesuaikan dengan fakta makro ekonomi.

Seberapa besar pengaruh kenaikan UMP bagi masyarakat dan perekonomian negara?
Kalau negara ingin daya beli meningkat, maka upah harus naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. ■ NNM